

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PUSKESMAS HIANG

Dori HP Putra¹

¹Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

Email: doriputra2610@gmail.com

ABSTRAK

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah diterapkan secara serentak di Indonesia semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun dalam penerapannya tidak semua daerah siap dengan segera mengadopsinya, salah satu Puskesmas hiang. Ketidak siapan penerapan ini antara lain disebabkan kurangnya kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lokasi penelitian dilakukan di pegawai Puskesmas hiang. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah pegawai yang sudah Pegawai Negeri Sipil, dan non asn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Puskesmas hiang.

Kata kunci : kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

ABSTRACT

Accrual-based government accounting standards have been implemented simultaneously in Indonesia since the enactment of Government Regulation Number 71 of 2010. However, in its implementation, not all regions are ready to immediately adopt it, one of the Hiang Health Centers. The unpreparedness of this implementation is caused by the lack of competence of human resources, organizational commitment and the use of information technology. This study aims to determine the influence of human resource competence, organizational commitment and the use of information technology on the level of application of accrual-based government accounting standards. The location of the research was carried out at the employees of the Hiang Health Center. The analysis tool used is multiple linear regression. The sample of this study is employees who are already Civil Servants, and non-civil servants. The results of this study show that the variables of human resource competence, organizational commitment and the use of information technology have a positive effect on the level of application of accrual-based government accounting standards at the Hiang Health Center.

Keywords: human resource competence, organizational commitment, information technology utilization, accrual-based government accounting standards

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan

efektifitas. Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan istilah New Public Management (NPM).

Saat ini merupakan era New Publik management (NPM) yaitu reformasi dalam sistem informasi keuangan. Perubahan ini merupakan elemen penting dalam meningkatkan manajemen atau pengelolaan dan pengambilan keputusan di lembaga pemerintah, yang juga disebut New Publik Financial Management (NPFM) (Guthrie et al., 1999). Adanya reformasi atau perubahan dalam sistem informasi keuangan ditandai dengan penggunaan akuntansi berbasis akrual di sektor publik, yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi kas tradisional (Lapsley, 1999).

Reformasi ini ditandai dengan diadopsinya IPSAS (International Publik Sector Accounting Standard) yang merupakan standar akuntansi sector publik berbasis akrual. Di Indonesia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2

(menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005). SAP berbasis akrual wajib diterapkan secara penuh mulai tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Peraturan ini berlaku di sector public yaitu di Pemerintah Daerah maupun Pusat, Lembaga Pemerintahan, Yayasan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Public lainnya yang berorientasi non laba.

Adanya pembaharuan akuntansi menghantarkan tersedianya informasi yang akuntabel, transparan, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pengguna informasi tersebut di sektor publik (Kober et al., 2010). Organisasi profesi internasional yaitu Governmental Accounting Standards Board (GASB) dan International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) telah mendorong penggunaan akuntansi akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan informasi

keuangan sector publik, meningkatkan informasi yang tepat waktu dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian (Lapsley,1999; Cohen, 2007). Informasi keuangan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pembuat keputusan internal agar lebih terkendali dan transparan dalam menggunakan sumber daya public secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif.

Dengan akuntansi basis akrual akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih berkualitas (relevan, reliable, dapat dipahami,dapat dibandingkan). Beberapa peneliti menyatakan bahwa laporan keuangan basis akrual belum dapat memenuhi kebutuhan penggunanya (Hay and Antonio, 1990; Daniels and Daniels, 1991;Brusca, 1997; Mack, 2004; Mack and Ryan, 2006), namun Mack and Ryan (2007) memberikan bukti adanya peningkatan pada pentingnya pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik.

1. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Akuntansi.

Menurut Paul Gradi (2017) akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis dapat dipercaya, dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kerjanya.

Akuntansi menurut Sumarsan (2007) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan (users) untuk pengambilan keputusan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi

1.1.1 Tujuan Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010), “tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Hans Kartikahadi dkk (2016), menyatakan bahwa “ tujuan akuntansi adalah untuk menyiapkan sebuah laporan keuangan yang akurat agar bisa dimanfaatkan oleh para manager, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, misalnya seperti saham, kreditur, atau pemilik”.

1.1.2 Manfaat Akuntansi

Manfaat akuntansi adalah untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Beberapa manfaat akuntansi dalam perkembangan usaha antara lain yaitu :

a. Manfaat akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan untuk dasar keputusan manajerial.

Menepati posisi managerial mengharuskan anda untuk cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, anda harus mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah keadaan keuangan perusahaan.

b. Manfaat akuntansi sebagai informasi atau laporan kepada pihak eksternal.

Pihak eksternal seperti investor dan pemegang saham memerlukan informasi seperti laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan manajemen. Manfaat akuntansi yang satu ini memungkinkan pihak eksternal untuk melacak perkembangan dan aktivitas perusahaan.

c. Alat pengontrol dan pengendali keuangan.

Dalam perkembangan usaha, akuntansi juga berperan sebagai alat pengontrol dan pengendali keuangan. Manfaat akuntansi dalam memberikan informasi pengelolaan dana seperti laba yang dihasilkan dan kerugian yang diderita oleh perusahaan secara tidak langsung berfungsi sebagai alat pengendali keuangan perusahaan.

d. Alat evaluasi perusahaan

Evaluasi tergolong penting karena dengan melakukan proses analisis dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan periode sebelumnya, anda bisa menemukan hal yang ditingkatkan serta umpan balik yang berguna untuk menyusun strategi perusahaan kedepannya.

e. Dasar pengalokasian sumber daya.

Sumber daya seperti modal jika diinvestasikan dengan tepat bisa menghasilkan laba untuk perkembangan usaha.

1.3 Jenis Jenis Akuntansi

Jenis jenis akuntansi antaralain :

1. Akuntansi Pemeriksaan (Auditing)

Akuntansi pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan audit dalam sebuah pemeriksaan akuntansi (auditing), dilakukanlah pemeriksaan hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang tersebut berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan di laporan yang telah dihasilkam oleh akuntansi keuangan.

2. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)

Akuntansi biaya merupakan sebuah bidang akuntansi yang mencatat, menghitung dan menganalisa sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri.

3. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)

Pada bidang ini tentu berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara menyeluruh. Akuntansi keuangan mengacu kepada pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil akan bersifat serba guna (general purpose).

4. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)

Akuntansi manajemen adalah sebuah bidang akuntansi memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalani usahanya.

5. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan arah penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya mengacu kepentingan penyusunan laporan pajak.

6. Budgeting

Bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan sebuah pedoman penuh bagi perusahaan, perorangan maupun pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa mendatang.

7. Sistem Akuntansi (Accounting System)

Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang menjalankan kegiatan dengan mengatur cara pencatatan akuntansi agar efektif dan efisien. Dimulai dari mengatur dokumen hingga menyusun prosedur pencatatannya

8. Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting)

Akuntansi anggaran merupan akuntansi yang memiliki kegiatan berkaitan dengan pengumpulan serta pengolahan data operasi keuangan yang telah terjadi, juga taksiran kemungkinan yang akan terjadi, tentunya untuk keentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan (anggaran) dalam suatu periode tertentu.

10. Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)

Akuntansi pemerintahan terbilang juga sebagai bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, mengatur dan pengawasan keuangan negara.

11. Akuntansi Perbankan

Akuntansi perbankan mengacu oada pengertian akuntansi untuk proses pencatatan, penganalisaan, pengklasifikasian dan juga penafsiran data keuangan. Akuntansi keuangan merupakan sebuah metode akuntansi bank yang meliputi sebuah pencatatan, penganalisaan, pengklasifikasian, penafsiran data di keuangan bank yang dilakukan secara sistematis, untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang memiliki berkepentingan baik internal dan juga eksternal.

1.1.3 Laporan Keuangan.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, dimana laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi

pembiayaan. Berkaitan dengan keuangan Negara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang didalamnya mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Kemudian pemerintah mengeluarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kemudian diganti dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. SAP juga merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dimana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan yang lengkap meliputi :

1. Laporan posisi keuangan (Neraca)
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Jadi tujuan akuntansi adalah menyajikan

informasi laporan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

1.4 Teori New Public Management (NPM)

Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzelay, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. Paradigma alternatif ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith, yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas.

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2002).

1.4 Perkembangan Akuntansi AkruaL Pada Pemerintah Indonesia

SAP yang berlaku sekarang adalah SAP berbasis akrual yang di atur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 (PP 71/2010) tentang standar akuntansi berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapat LO<beban,aset,LRA,belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang di tetapkan dalam anggaran negara/daerah. Alasan pembaruan SAP adalah agar untuk menyediakan informasi yang lebih dalam (1) menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya, (2) Menilai kinerja,posisi keuangan, dan arus kas, serta (3) membuat keputusan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process).

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Kemudian sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

SAP Berbasis AkruaI terdapat pada Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas, yaitu mulai akhir tahun 2010. Sedangkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI.

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP tersebut, yaitu sampai dengan akhir tahun 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis AkruaI.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku.

kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akruaI menjadi akruaI, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu dalam Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada APBN/APBD menggunakan basis akruaI. Di lain pihak, praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian besar negara, termasuk Indonesia, menggunakan basis kas. Untuk itu KSAP menyusun SAP Berbasis AkruaI yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (budgetary

reports), dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan finansial, yang memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.

Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat). Laporan finansial yang berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Salah satu kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kondisi pemerintah yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintahan yang disusun berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP tersebut (masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini disclaimer dari BPK RI). Oleh karena itu, sampai sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah khususnya di tingkat satuan kerja saat ini dan faktor-faktor yang meliputi sumber daya manusia dan organisasi dari satuan kerja tersebut, menjadi objek penelitian ini. yang diharapkan memberikan gambaran yang lebih tepat atas penerapan akuntansi akrual pada pemerintah.

1.5 Pelitian Terdahulu

Menurut Dwi Ratmono (2015) Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar.

Menurut Jan Hoesada (2015), Basis Akrual merupakan basis akuntansi yang pendapatan di akui saat di hasilkan tanpa perlu memperhatikan penerimaan kas (dapat lebih dahulu, atau arus kas masuk tunai, atau belakang atau pendapatan kredit), dan beban di akui saat terjadinya beban tanpa perlu memerhatikan pembayarannya.

Menurut Robbins (2002), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah Aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari Aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

Putra dan Ardiyanto (2015) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara komitmen dalam suatu organisasi dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Norfaliza (2015), Azman (2015), Kristyono (2013) dan Widyastuti (2015) menyatakan bahwa komitmen dalam suatu organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Simanjuntak (2010) Menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementrian atau lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerimaan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

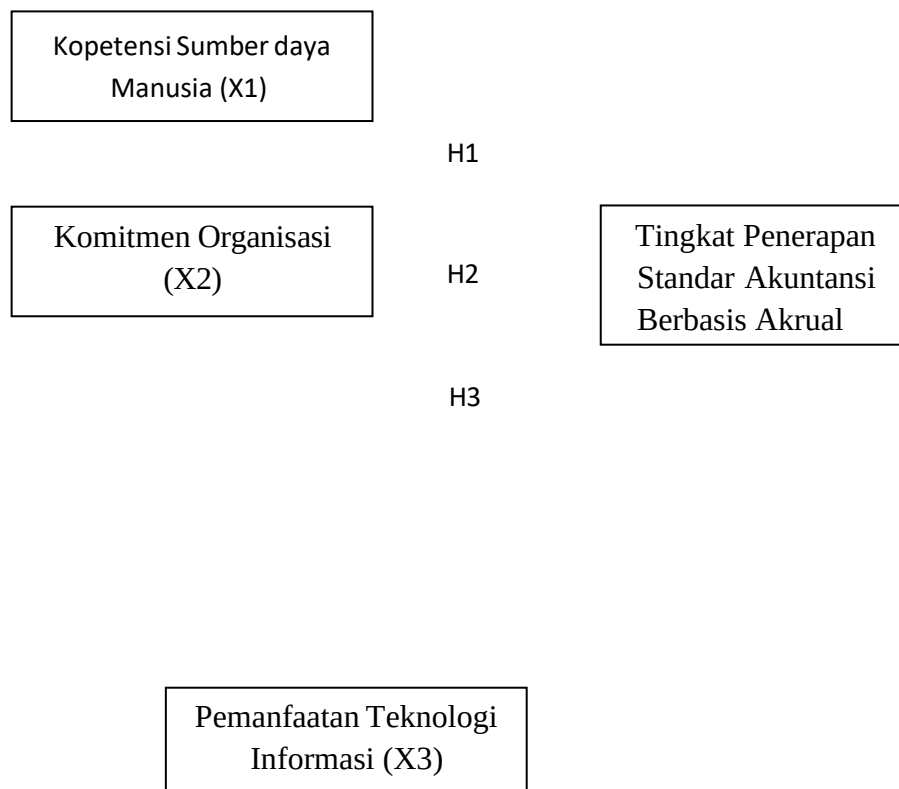
Mongoloi dan Siswantoro (2013) yang meneliti tentang analisis kesiapan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada biro keuangan juga menemukan bahwa sistem informasi belum berpengaruh terhadap penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

1.6 Kerangka Konseptual.

Berdasarkan Kajian teoritis dan pengembangan hipotesis yang telah dikemukakan, gambar berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian ini:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan : Pengaruh secara persial Pengaruh secara simultan

Hipotesis Penelitian

1. $H_0 : r = 0$ diduga bahwa secara persial tidak dapat pengaruh signifikan antara tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.
 $H_1: r \neq 0$ diduga terdapat pengaruh secara parsial tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.
2. $H_0 : r = 0$ diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.
 $H_2 : r \neq 0$ diduga terdapat pengaruh secara parsial tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.
3. $H_0 : r = 0$ diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.
 $H_3 : r \neq 0$ diduga terdapat pengaruh secara simultan tingkat penerapan akuntansi

akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.

4. $H_0 : r = 0$ diduga bahwa secara parsial tidak dapat pengaruh tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.

$H_4 : r = 0$ diduga terdapat pengaruh secara parsial tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang. $H_0 : r = 0$ diduga bahwa secara parsial tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.

$H_5 : r = 0$ diduga terdapat pengaruh secara parsial tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.

$H_a : r = 0$ diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di puskesmas Hiang.

METODE

Objek yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu di Puskesmas Hiang. waktu penelitian selama kurang lebih 3 minggu (Dari tanggal 8 Oktober). Objek penelitian yakni pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jenis data yakni data kuantitatif. Sumber data yakni data primer. Menurut Sugiyono (2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penelitian menggunakan tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai variabel terikat, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.

1.1 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara variabel independen yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi akrual pada puskesmas hiang

1.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Pemerintah puskesmas Hiang (Y). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Komitmen Organisasi (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3).

1.3 Populasi dan sampel

Sebelum melaksanakan penelitian harus ditentukan terlebih dahulu populasi yang akan diteliti sebagai subjek dari penelitian. Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang akan diteliti, maka adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di puskesmas Hiang yang berjumlah 67 Pegawai.

Menurut Sugiyono (2010) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dari keseluruhan populasi, sampel yang akan diambil yaitu Pegawai Puskesmas hiang yang ber jumlah 30 Pegawai.

Sampel penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang di miliki oleh populasi tersebeut. Kriteria pemilihan KPA sebagai responden karena diharapkan mereka mengetahui dan memahami mengenai penerapan sistem akuntansi akrual yang baru didalam organisasi mereka, sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel Puskesmas hiang yang berjumlah 30 satuan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Diskripsi Hasil Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang Pegawai Puskesmas Hiang (Responden), sebagai acuan untuk menganalisis data. Untuk mengetahui penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisa regresi linear hasil penelitian yang telah dilakukan maka bab IV ini penulis akan menganalisis hasil berganda, uji t, uji f, dan melalui komputer dengan menggunakan program SPSS 20.

4.2 Analisis Data Dan Pembahasan

4.2.1 Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui persamaan analisis regresi linear berganda dari pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi akrual pada pemerintah di Puskesmas Hiang.

Tabel 4.10 Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.480	12.888		2.13	.043
Kompetensi SDM (X1)	-2.505	.851	-1.711	2.942	.007
Komitmen (X2)	.807	.284	1.608	2.84	.009
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.342	.142	.379	2.40	.024

a. Dependent Variable: Penerapan akuntansi akrual (Y)

Sumber : Data Primer Yang Di Olah SPSS 20

Dari tabel 4.9 diatas dapat digambarkan persamaan regresi berikut : $Y = 27.480 - 2.505 + 0.807 + 0.3$

Dengan penjelasan dari persamaan diatas adalah :

1. Nilai dari a = 27.480 artinya ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi
2. Nilai dari b1 = -2.505 artinya tanda negatif mengartikan bahwa pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia adalah negatif, semakin buruk kompetensi sumber daya manusia maka ada kecenderungan terjadi penurunan dari penerapan akuntansi akrual.
3. Nilai dari b2 = + 0.807 artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari komitmen organisasi adalah positif, semakin baik komitmen organisasi maka ada kecenderungan terjadi peningkatan dari penerapan akuntansi akrual.
4. Nilai dari b3 = +0.342 artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi adalah positif, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka ada kecenderungan terjadi peningkatan dari penerapan akuntansi akrual.

4.2.1 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan manfaat teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah di Puskesmas Hiang. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732	.536	.483	3.17150

	a			
--	---	--	--	--

penerapan akuntansi akrual di pengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya manusia (X1),komitmen organisasi (X2),pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,732% atau $KD = r \times 100\%$ maka $(0,732 \times 100\% = 53,6\%)$. Hal ini menunjukkan bahwa 53,6% merupakan kontribusi variabel kompetensi sumber daya manusia (X1),komitmen organisasi (X2),pemanfaatan teknologi informasi (X3)

terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual, sedangkan sisanya 46,4% $(100\% - 53,6\%)$. Dapat di jelaskan oleh variabel variabel lain di luar variabel penelitian.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Secara Parsial (t)

Untuk menguji signifikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi akrual pada Puskesmas Hiang. secara parsial menggunakan uji t. Dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel 2,042, t tabel diperoleh dengan cara $df = n - k = 30 - 4 = 26$, maka diperoleh t tabel = 2,042 ,

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.480	12.888		2.13	.043
Kompetensi SDM (X1)	-2.505	.851	-1.711	-2.942	.007
Komitmen (X2)	.807	.284	1.608	2.84	.009

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.342	.142	.379	2.405	.024
--------------------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penerapan akuntansi akrual (Y)

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.12 bisa dilihat hasil dari uji t sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh Kompetensi SDM terhadap penerapan akuntansi akrual pada Puskesmas Hiang, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2.942 < 2,042$) dan $sig < \alpha$ ($0,007 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Komitmen terhadap penerapan akuntansi akrual pada di Puskesmas Hiang, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.846 > 2,042$) dan $sig < \alpha$ ($0,009 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap penerapan akuntansi akrual pada Puskesmas Hiang, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.405 > 2,042$) dan $sig < \alpha$ ($0,024 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.5.2 Uji Simultan (F)

Untuk menguji signifikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah di Kecamatan Sitinjau Laut. secara simultan menggunakan uji f.

Dengan membandingkan antara f hitung dengan f tabel, f tabel ditentukan dengan $df_1 = k-1$ ($4-1 = 3$) dan $df_2 = n-k$ ($30-4 = 26$) sehingga didapatkan f tabel adalah 2,98. Untuk menguji hipotesisnya didapat dari :

Tabel 4.13 Hasil uji f

ANOVA^a

Model	Sum of	df	Mean	F	Sig.
-------	--------	----	------	---	------

		Squares		Square		
1	Regression	302.347	3	100.782	10.02	.000
	Residual	261.519	26	10.058	0	b
	Total	563.867	29			

a. Dependent Variable: Penerapan akuntansi akrual (Y)

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan diatas tentang pengaruh profesionalisme (X1), komunikasi (X2) dan lingkungan kerja (X3) terhadap Tingkat penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Hiang dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh Kompetensi SDM terhadap Tingkat penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Hiang, ini dibuktikan dengan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-2.942 < 2,042$) dan $\text{sig} < \alpha$ ($0,007 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Komitmen terhadap Tingkat penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Hiang, ini dibuktikan dengan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2.846 > 2,042$) dan $\text{sig} < \alpha$ ($0,009 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Tingkat penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Hiang, ini dibuktikan dengan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2.405 > 2,042$) dan $\text{sig} < \alpha$ ($0,024 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
4. Besarnya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia (X1), komitmen
5. organisasi (X2) Dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) Terhadap Tingkat penerapan standar akuntansi berbasis akrual sebesar 0,732% atau $KD = r \times 100\%$ maka ($0,732 \times 100\% = 53,6\%$). Hal ini menunjukkan bahwa 53,6% merupakan kontribusi variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), komitmen organisasi (X2), pemanfaatan

teknologi informasi (X3) terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual, sedangkan sisanya 46,4% (100% - 53,6%). Dapat di jelaskan oleh variabel variabel lain di luar variabel penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan bab pembahasan dan kesimpulan, maka untuk meningkatkan dan mempertahankan pegawai maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Hal yang perlu disarankan berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, bahwa hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan akuntansi akrual pada Puskesmas Hiang sudah sangat baik. Berdasarkan pada hal tersebut KaPus diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja pegawai serta memahami pola kepemimpinan yang tepat terhadap para pegawai.

2. Hal yang perlu disarankan berkaitan dengan Komitmen organisasi, bahwa hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata variabel komitmen organisasi terhadap penerapan akuntansi akrual pada Puskesmas Hiang sudah sangat baik. Berdasarkan pada hal tersebut KaPus diharapkan untuk terus menciptakan hubungan yang baik dengan Pegawai, karena kesuksesan dalam pencapaian tujuan Puskesmas dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam berkomunikasi (pencapaian tugas dan peraturan) kepada karyawan.

Hal yang perlu disarankan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, bahwa hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap pegawai Puskesmas Hiang sudah sangat baik. Berdasarkan pada hal tersebut pimpinan diharapkan untuk pemberian fasilitas dan keamanan bagi para pegawai Puskesmas

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). *Report To Nations. Association Of Certified Fraud Exminers*. Austin. Retrieved From <https://www.acfe.com/Rttn2022Des/2022-Report-Tothe-Nations-Pdf>
- AICPA. (2003). *Auditor's Responsibility For Fraud Delection. Journal Of Accauntancy*. (Serial Online). Jan-Mar., Di Akses Pada 20 Juni 2022. Available From: Url: [Http://www.aicpa.org/Pubs/Jofa](http://www.aicpa.org/Pubs/Jofa)

- Damayanti, D. N. S. (2016) "Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pegawai Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta)". *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Dewi, P. A Y. (2020). "Pengaruh Komitmen Pimpinan, Moralitas Individu, Penegakan Hukum Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan (Fraud) Pada Satuan Kerja Karyawan Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng". *Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Dewi, T. K. (2020). "Pengaruh Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pegawai (Studi Kasus di CV. Tasindo Daya Parakan)". *Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Sanata Dharma*.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2016). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol 1, No.1.
- Ghozali, I. (2009). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS" Semarang : UNDIP.
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Husen, I. (2019). "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa Se Kecamatan Adiwerna". *Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang*.
- Kurniawan, Gusnardi. (2013), *Pengaruh Moralitas, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*
- Putri, A. A. P. A. (2014). *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Puspasari (2012). "Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah". Tess. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Pratiwi, F. C. (2016). "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dan Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero)". *Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Pasundan*.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Rahmat, A. 2018. *Moralitas Dan Pengendalian Internal Dalam Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen Pada Konteks Perguruan Tinggi Negeri-Blu)*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Radhiah, T. (2016). *Pengaruh Efektifitas Pengendalin Internal, Kesusaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi* .JOM Fekon, 3 (1), 1279-1293.
- Radhiah, T. (2016). *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. JOM Fekom. Vol.3. No.1 (Februari) 2016.
- Rahmawati, A. P. (2012). Analisis Faktor Internal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi: Universitas Diponegoro*.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Yumaini. (2017). Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.3, No. 1
- Widyaswari, Et Al. 2017. "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Sekecamatan Susut". Singaraja: *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 8 No. 2.
- Zainal, R. (2013). *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah Dan Swasta Di Kota Padang)*. 1(3).
- Zamzami, F., Faiz, I.A., Mukhlis. (2016). *Audit Internal: Konsep Dan Praktik*. Yogyakarta: Ugm Press.